

Efektivitas Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka

Erik Hidayat ^{1*}, Anggiat Pardosi ², Irwan Zulkarnaen ³

^{1,3} Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Indonesia

² SMPN 195 Jakarta, Indonesia

* ehidayat3@gmail.com

Abstract

The presence of independent learning is a major transformation in the world of education in Indonesia. The essence of the independent learning curriculum is to create a student-centered learning process. In implementing independent learning, the national education system gives a signal that curriculum development is handed back to the education unit. Based on this, schools as educational units have the freedom to develop the curriculum in accordance with the competencies they have independently. The purpose of this research is to identify the role of the principal in implementing the independent curriculum at SMPN 195 Jakarta. This study uses a qualitative approach. The research is located at SMPN 195 Jakarta. Data collection techniques using interview techniques, documentation and observation. Data sources in this study are divided into primary and secondary data. The primary data in this study are: (1) school principals, (2) educators/educational staff (3) other parties needed to obtain information. Secondary data obtained through; journals, online newspapers, web, books and various literature. Data analysis with stages: data reduction (reduction), data presentation (display), and verification or conclusion (conclusion drawing). Testing the validity of the data includes testing internal validity (credibility), external validity (transferability), reliability (dependability), and objectivity (confirmability). Observation results show that there are still several problems, namely: (1) limited teacher competence in relation to the independent curriculum, (2) implementation of differentiated learning that is not optimal, (3) implementation of the use of IT that is not yet comprehensive in various activities, especially in learning activities. The role of the Head of SMPN 195 Jakarta, as a leader in the education unit in applying independent learning, namely by planning, organizing, implementing, and evaluating.

Keywords: *Efektivitas, Kepala Sekolah, Kurikulum, Merdeka Belajar*

Pendahuluan

Kebijakan merdeka belajar mulai diterapkan oleh Kemdikbud pada tahun 2019. Kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam melakukan transformasi pendidikan agar terwujud sumber daya manusia yang lebih baik. Keunggulan dalam merdeka belajar tersebut adalah karakter profil pelajar pancasila. Dengan merdeka belajar diharapkan siswa memiliki karakter profil pancasila, dimana siswa memiliki karakter dan kompetensi, yang sesuai pada nilai-nilai luhur pancasila. Dampak kebijakan tersebut tentu bermuara pada siswa. Hal tersebut karena siswa merupakan subyek pendidikan. Dengan merdeka belajar, siswa diharapkan memiliki karakter profil pelajar pancasila yaitu beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif (kemdikbud, 2020).

<https://doi.org/10.30605/jsqp.6.1.2023.2339>

Pembentukan merdeka belajar dan penerapannya pada dunia pendidikan Indonesia saat ini adalah kemajuan teknologi dan komunikasi abad 21 yang mengalami perkembangan pesat secara terus menerus. Dengan pertimbangan tersebut, muncul asumsi bahwa merdeka belajar dapat diterapkan untuk mendampingi perkembangan belajar siswa sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan merdeka belajar, pemerintah berharap pelajar di Indonesia memiliki kecerdasan dalam berpikir kritis dan berkarakter agar dapat mengimbangi perkembangan teknologi saat ini (Sulistiyosari et al., 2022). Kemenristekdikti secara resmi meluncurkan program merdeka belajar pada tanggal 11 Februari 2020, program tersebut berupa kurikulum merdeka belajar dan *platform* merdeka mengajar. Kurikulum merdeka belajar merupakan perubahan dari kurikulum terdahulu yang pernah diterapkan di Indonesia.

Kurikulum merdeka belajar ini dibuat sesuai dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya (Ramadina et al., 2021.). Kurikulum ini juga sangat tepat diterapkan pada abad ini, guna menyambut era digital seperti saat ini (Wulandari et al., 2022). Konsep yang ditawarkan dalam merdeka belajar adalah pembangunan sistem pendidikan nasional dalam rangka menuju perubahan dan kemajuan suatu bangsa. Kebijakan merdeka belajar adalah perubahan untuk menuju keberhasilan dalam bidang Pendidikan (Daga, 2021). Perubahan tersebut berupa upaya dalam menuju kesuksesan dalam meraih kemerdekaan diartikan sebagai keleluasaan, kemandirian dan juga kebebasan.

Merdeka belajar merupakan upaya performatif untuk membuat perubahan pada seluruh stake holder pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa bahkan tenaga kependidikan dan warga sekolah dalam rangka mendukung terwujudnya potensi manusia Indonesia baru, yang lebih berkualitas dan berkarakter serta siap menghadapi tuntutan zaman. Posisi kurikulum dalam hal ini bersifat fleksibel dalam penerapan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan setiap daerah. Kepala sekolah, guru dan peserta didik adalah ujung tombak dari pelaksanaan merdeka belajar di sekolah, sampai saat ini belum memiliki keleluasaan dan kebebasan yang cukup dalam menentukan arah dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah (Angga & Iskandar, 2022). Meskipun kurikulum telah dibuat sesederhana mungkin untuk mengikuti dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, namun pada penerapannya masih belum maksimal. Bahkan tak jarang Kepala sekolah dan guru yang masih bingung dalam mengaplikasikan merdeka belajar di sekolah, yang pada akhirnya pembelajaran dikembalikan berpusat pada guru seperti keadaan sebelumnya (Suryana & Iskandar, 2022).

Dalam kaitannya dengan program merdeka belajar di sekolah, SMPN 195 Jakarta, mulai menerapkan konsep kurikulum merdeka dalam pembelajaran saat ini. Hal yang coba diterapkan dalam merdeka belajar di SMPN 195, yaitu: (1) Kegiatan Pendampingan konsultasi berupa Program kerjasama yang diatur oleh Kemendikbud dan pemerintah daerah dalam pendampingan, pembinaan dan pembimbingan implementasi merdeka belajar di SMPN 195 Jakarta. (2) Melakukan pelatihan (*coaching*) secara intensif dan masif dengan pelatih dari Kemdikbud, sebagai penguatan sumber daya manusia di sekolah, untuk kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan. (3) Membuat kegiatan pembelajaran dengan paradigma baru, hal ini berarti pembelajaran berfokus pada penguatan kompetensi dan tumbuh kembang siswa sesuai dengan profil pelajar pancasila. (4) Seluruh perencanaan berbasis data, dengan manajemen berbasis sekolah, berdasarkan hal tersebut perencanaan dibuat atas dasar refleksi diri sekolah. (5) Digitalisasi Sekolah, hal ini berarti pembelajaran didesain menggunakan pendekatan *customized* sebaik mungkin menggunakan berbagai platform digital yang bertujuan memudahkan dan menghindari kompleksitas dalam pembelajaran.

Hasil observasi dalam penerapan kurikulum merdeka belajar di SMPN 195 Jakarta, menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa problematika dalam implementasi kurikulum merdeka belajar, yaitu: (1) terbatasnya kompetensi yang dimiliki guru dalam kaitannya dengan kurikulum merdeka, (2) pelaksanaan diferensiasi pembelajaran belum maksimal, (3) penerapan penggunaan IT yang belum menyeluruh dalam berbagai kegiatan di sekolah, khususnya dalam kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, tentunya terdapat peran serta seorang kepala sekolah dalam mengurai dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Berbagai upaya dapat dilakukan dalam pencapaian tujuan kurikulum merdeka belajar, diantaranya supervisi dan pertemuan rutin secara berkala sebagai evaluasi guna mendiskusikan berbagai temuan, yang merupakan permasalahan untuk dicari dan dibuat formulasi dalam menyelesaikan temuan masalah tersebut sebagai bentuk pembinaan dan perbaikan dalam menerapkan kurikulum merdeka di SMPN 195 Jakarta. Penelitian ini berkaitan dengan peran kepala sekolah dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini, untuk mengidentifikasi peran kepala sekolah dalam menerapkan kurikulum merdeka di SMPN 195 Jakarta, sehingga terdeskripsikan dengan jelas secara detail pelaksanaan kurikulum merdeka di SMPN 195 Jakarta.

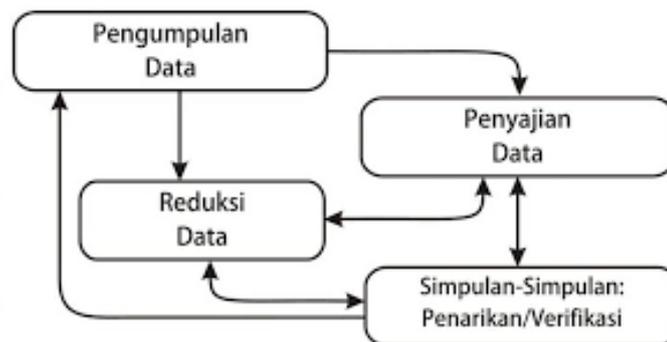
Kepala sekolah merupakan pendukung utama dalam pembuatan kebijakan dalam ruang lingkup yang paling kecil, yaitu sekolah. Kebijakan yang dibuat oleh seorang kepala sekolah adalah kebijakan mendukung proses pembelajaran yang dapat melahirkan lulusan-lulusan yang berkompentensi dan berkarakter sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman (Puspita et al., 2021; (Berkovich, 2018). Peran kepala sekolah dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan terkait dengan merdeka belajar adalah keterlibatan kepala sekolah secara aktif dalam proses pengembangan kurikulum. Keterlibatan tersebut dimaksudkan agar seorang kepala sekolah dapat menggerakkan tenaga pendidik dan kependidikan di tempat tugasnya dalam upaya menciptakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa.

Sebagai seorang pemimpin di sekolah, kepala sekolah dituntut untuk dapat menerjemahkan kebijakan pemerintah dalam penerapan kebijakan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang dipimpinnya (Arviansyah et Al., 2022). Dengan kemampuan tersebut, kepala sekolah diharapkan dapat memenuhi perannya sebagai pemimpin di sekolah, sesuai dengan tuntutan merdeka belajar yang telah diterapkan. Berdasarkan hal tersebut, sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan organisasi sekolah, kepala sekolah akan mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam penerapan merdeka belajar dengan tepat. Melalui peran strategis yang dimiliki kepala sekolah, penerapan merdeka belajar akan terlaksana dengan maksimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan, yaitu terwujudnya sumberdaya manusia yang berlandaskan pada profil pelajar pancasila (Sihaloho, 2022).

Penulis memiliki perspektif bahwa kepala sekolah adalah tokoh sentral dalam implementasi merdeka belajar. Kepala sekolah adalah penentu langkah dalam kemajuan suatu sekolah Karena itu, peran kepala sekolah sangat besar dalam implementasi merdeka belajar, khususnya dalam satuan Pendidikan (Ham et al., 2015; Ibukun et al., 2011). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini perlu dan penting dilaksanakan sebagai kontribusi yang positif yang baik dan bermanfaat untuk perkembangan dunia pendidikan pada masa yang akan datang. Kebaruan dalam penelitian ini berupa transformasi dunia pendidikan di Indonesia dalam menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam pelaksanaan belajar mandiri, sistem pendidikan nasional memberi isyarat bahwa pengembangan kurikulum diserahkan kembali kepada satuan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, sekolah sebagai satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya secara mandiri.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di SMPN 195 Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah; (1) kepala sekolah, (2) pendidik/tenaga kependidikan dan (3) pihak lain yang diperlukan dalam memperoleh informasi. Data sekunder diperoleh melalui Jurnal, Koran Online, Web, buku dan berbagai literatur. Dokumentasi dan observasi partisipasi dilakukan dalam mengumpulkan data. Analisis data dengan tahapan analisis data, melalui; reduksi data (*reduction*), penyajian data (*display*), dan verifikasi atau kesimpulan (*conclusion drawing*). Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal (*credibility*), validitas eksternal (*transferability*), reliabilitas (*dependability*), dan obyektifitas (*confirmability*) (Huberman, 2002).



Gambar 1. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

Peran Kepala Sekolah Dalam Merdeka Belajar

Kepala SMPN 195 Jakarta, adalah seseorang yang bertugas membina lembaga SMPN 195 Jakarta agar berhasil mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, sebagai kepala sekolah ia harus mampu memberi arahan dan mengoordinasi segala kegiatan. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang dipimpinnya, khususnya dalam mendesain kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan, baik dalam skala yang kecil yaitu tujuan pembelajaran, maupun dalam skala besar, yaitu tujuan pendidikan nasional (Hafid et al., 2021). Peran Kepala SMPN 195 Jakarta, sebagai manajer dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yaitu dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi (Kempa et al., 2017; Sebastian et al, 2019). Perencanaan dilakukan dalam tiga tahap. Tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, kepala sekolah bersama dengan tim manajemen sekolah, melakukan rapat koordinasi. Rapat ini bertujuan merumuskan serta menetapkan program dalam implementasi merdeka belajar yang akan diterapkan di SMPN 195 Jakarta. Selain program, dalam rapat ini juga ditentukan berbagai variabel yang dibutuhkan sebagai penunjang dalam pelaksanaan program, seperti; biaya dan alokasi waktu yang dibutuhkan dalam satu tahun ajaran ke depan. Kedua, kepala sekolah dan tim manajemen sekolah mengadakan pertemuan lanjutan, atau rapat lanjutan bersama dengan seluruh guru dan tenaga kependidikan untuk membuat kesepakatan, menetapkan dan menyosialisasikan program implementasi merdeka belajar yang telah dibuat oleh kepala sekolah bersama dengan tim manajemen sekolah. Dalam rapat ini juga disepakati

pembagian tugas, pembina ekstrakurikuler, wali kelas, guru, dan tenaga pendidik dalam penerapan pelaksanaan program merdeka belajar yang akan dilaksanakan di SMPN 195 Jakarta. Ketiga, kepala sekolah dan tim manajemen sekolah, guru dan tenaga pendidik melaksanakan rapat dengan orangtua siswa dalam sosialisasi dan transparansi program yang telah dibuat dan disepakati oleh pihak sekolah. Dalam hal ini program telah disepakati untuk dilaksanakan oleh kepala sekolah, manajemen sekolah, guru dan tenaga kependidikan di lingkungan SMPN 195 Jakarta. Dan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut dalam rapat bersama orangtua siswa juga dibuat kesepakatan atas hal tersebut.

Tahap pengorganisasian dilakukan oleh Kepala SMPN 195 Jakarta dengan membagi tugas tim struktural dan penanggungjawab pelaksana program implementasi merdeka belajar. Hal tersebut dilaksanakan ketika rapat bersama guru dan tenaga pendidikan di SMPN 195 Jakarta, setelah program disepakati. Pembagian tugas tersebut disesuaikan dengan keadilan dan kompetensi SDM yang dimiliki SMPN 195 Jakarta. Pada tahap pelaksanaan, tentunya pelaksanaan dijalankan sesuai dengan program yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam hal pelaksanaan tentunya berpedoman pada RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang telah disusun untuk tahun ajaran berjalan sesuai dengan program implementasi merdeka belajar yang dibuat dan kalender pendidikan. Pelaksanaan program tidak lepas dari tujuan sekolah dan visi serta misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan tahap evaluasi dilakukan dengan pelaksanaan supervisi dengan waktu yang fleksibel, disesuaikan dengan jadwal guru dan tim penilai supervisi. Evaluasi juga dilakukan dengan rapat rutin antara kepala sekolah dan tim manajemen sekolah, atau antara kepala sekolah, tim manajemen sekolah dengan guru dan tenaga pendidik. Selain itu, terdapat rapat tentatif yang dilakukan berdasarkan temuan yang didapatkan di sekolah. Rapat umumnya dilakukan untuk melakukan perubahan kecil dan mencari solusi atas temuan masalah dalam pelaksanaan implementasi merdeka belajar di sekolah.

Sebagai pemimpin dalam satuan pendidikan, kepala SMPN 195 Jakarta, memiliki peran sebagai; (a) pemantau, kepala SMPN 195 berkewajiban untuk monitoring peserta didik, guru, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan lingkungan sekolah; (b) perantara guru dan siswa, dalam hal ini, kepala SMPN 195 Jakarta adalah tempat konseling bagi guru dan siswa dalam berbagai permasalahan yang ditemukan sehingga terjalin kedekatan; (c) pendisiplin, dalam hal ini kepala SMPN 195 Jakarta mendisiplinkan guru, siswa dan tenaga pendidik dengan penerapan *punishment* dan *reward* yang tepat dan berkeadilan bagi guru, siswa dan tenaga pendidik di lingkungan SMPN 195 Jakarta; (d) motivator, sebagai seorang kepala sekolah di SMPN 195 Jakarta, ia sering melakukan motivasi pada siswa dimana siswa cenderung mudah jenuh, tidak hanya pada siswa tapi juga guru dan tenaga pendidik agar terus melecutkan semangat untuk mengimplementasikan merdeka belajar secara maksimal dan menciptakan siswa berprofil pelajar pancasila; (e) perantara, kepala SMPN 195 Jakarta adalah seorang perantara atau penghubung. Maksudnya, kepala sekolah adalah perantara sekolah dengan pihak lain di luar sekolah dalam kerjasama meningkatkan mutu dan kualitas sekolah sesuai dengan program implementasi merdeka belajar yang telah ditetapkan; (f) pembimbing, dalam hal ini kepala SMPN 195 Jakarta adalah sosok yang dapat membimbing siswa, guru dan tenaga pendidik secara berkelanjutan, dengan melakukan pemetaan dan memfasilitasi warga sekolah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki ; (g) pembina, Kepala SMPN 195 Jakarta adalah pembina dalam meningkatkan kemampuan siswa, guru dan tenaga pendidik, dalam peningkatan kompetensi potensi diri dalam mewujudkan program implementasi kurikulum merdeka sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan; (h) pembuat keputusan, dalam hal ini kepala SMPN 195 Jakarta, harus dapat menelaah kebijakan merdeka belajar yang telah dibuat oleh pemerintah, kemudian membuat kebijakan yang disesuaikan dengan lingkungan SMPN 195 Jakarta, tentunya sesuai

dengan tujuan yang ditetapkan pemerintah dalam kurikulum merdeka belajar dan tidak menyimpang dari visi misi sekolah dan tujuan sekolah; dan (i) inovator, kepala SMPN 195 Jakarta harus memiliki kemampuan dalam mengembangkan pembelajaran, atau memodifikasi pembelajaran sebagai inovasi dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di SMPN 195 Jakarta.

Kepala sekolah selayaknya adalah pemimpin yang demokratis, meskipun pengambilan keputusan secara penuh berada di kepala Sekolah (Sehgal et al., 2017), tetapi keputusan tersebut umumnya didasarkan pada hasil musyawarah dari guru dan warga sekolah, sehingga tidak membuat sebuah keputusan berdasarkan keinginan pribadi (Sanusi, 2021). Kepala SMPN 195 Jakarta, Sebagai seorang pemimpin, adalah sosok yang berani dan mampu membuat keputusan atau kebijakan yang tepat dalam musyawarah dan mufakat bersama guru dan tenaga Pendidikan (Sunaengsih et al., 2019). Pendekatan humanisme yang menyeluruh kepada seluruh warga sekolah dilakukan oleh kepala sekolah, sebagai wujud pemantauan atas kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan, sebagai implementasi merdeka belajar.

Kepala SMPN 195 Jakarta dalam lingkungan satuan pendidikan yang dipimpinnya, dikenal cukup responsif, khususnya ketika program tidak berjalan sesuai dengan keinginan atau terdapat temuan yang terindikasi sebagai problematika, kepala sekolah membuat inovasi baru untuk mengatasi hal tersebut. Hal ini dilakukan agar program dapat berjalan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan, sehingga tujuan program implementasi merdeka belajar dapat tercapai dengan maksimal. Peninjauan secara rutin dan berkala merupakan hal yang rutin dilakukan oleh Kepala SMPN 195 Jakarta di lingkungan sekolah untuk memastikan lingkungan sekolah kondusif mulai dari peserta didik, guru, tenaga kependidikan dan sarana prasarana. Hal tersebut dilakukan sebagai evaluasi, guna perbaikan pada masa yang akan datang.

Implementasi Merdeka Belajar

Hadirnya merdeka belajar, merupakan transformasi besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kebijakan merdeka belajar tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2020. Esensinya kurikulum merdeka belajar menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa (Wannesia et al., 2022). Hal ini adalah bukti bahwa merdeka belajar adalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yang mencoba mengedepankan formulasi pembelajaran yang terpusat pada siswa. Pengelola pendidikan khususnya kepala satuan pendidikan mendapatkan tantangan yang luar biasa dalam memahami implementasi merdeka belajar ini. Di samping menghadapi pembiasaan baru dalam pembelajaran, juga dihadapi dengan adaptasi perubahan kurikulum yang cukup signifikan. Karena hadirnya kurikulum merdeka di akhir pandemi covid-19, yang mengusung pembiasaan baru dalam hidup sehat (Mahlianurrahman et al., 2022).

Penerapan merdeka belajar, sistem pendidikan nasional memberikan sinyal bahwa pengembangan kurikulum diserahkan kembali pada satuan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, sekolah sebagai satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum tersebut sesuai dengan kompetensi yang dimiliki secara mandiri (Arviansyah et al., 2022). Oleh sebab itulah kepala sekolah dan tim manajemen sekolah harus mampu mengembangkan diri untuk mengimplementasikan merdeka belajar. Kehadiran kurikulum merdeka belajar, sebetulnya sebuah jawaban atas kebutuhan kurikulum yang adaptif. Kurikulum yang bisa dilaksanakan sesuai potensi sekolah dan direfleksikan setiap waktu.

Sebagai Kepala SMPN 195 Jakarta, yang memiliki peran sentral dalam program implementasi merdeka belajar di satuan pendidikan yang dipimpinnya, tentunya ia harus bertanggungjawab sesuai dengan beban kerja yang dimiliki. Beban kerja tersebut adalah;

- 1) Pengelolaan sekolah, sebagai tugas pokok manajerial.
- 2) Kewirausahaan, sebagai pengembangan karakter.
- 3) Supervisi, terkait pembimbingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja, baik guru dan tenaga pendidik.

Pemahaman beban kerja tersebut, tampaknya sudah sepenuhnya dikuasai, Kepala SMPN 195 Jakarta dengan baik untuk memimpin sekolah ke arah keberhasilan dalam menerapkan program merdeka belajar di sekolah. Langkah yang dilakukan Kepala SMPN 195 Jakarta untuk menerapkan konsep merdeka belajar dalam program yang telah ditapkannya di sekolah antara lain:

- 1) Menerapkan kebijakan, tepat kondisi yang mendukung pelaksanaan merdeka belajar.
- 2) Pembinaan guru sehingga memiliki sifat dan karakter terbuka dalam kegiatan belajar mengajar agar terjadi pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan bagi siswa.
- 3) Pengondisian siswa dalam belajar, dengan arti kesiapan dan suasana hati siswa untuk belajar sehingga siswa dapat berpartisipasi aktif dengan keingintahuannya dalam pembelajaran.
- 4) Partisipasi aktif orangtua dalam memantau hasil belajar dan kolaborasi antara sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat dalam pembentukan karakter profil pelajar pancasila bagi siswa.
- 5) Pelaksanaan berbagai pelatihan implementasi merdeka belajar untuk meningkatkan kualitas dan potensi guru dalam menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran.

Sesuai dengan indikator keberhasilan implementasi merdeka belajar di sekolah, pelaksanaan merdeka belajar di SMPN 195 Jakarta dilakukan dengan:

- 1) Meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran secara merata. Pemerataan pembelajaran dengan peningkatan kualitas untuk dapat diakses oleh seluruh siswa dan warga sekolah demi mendukung pembelajaran secara maksimal, dalam mewujudkan merdeka belajar secara utuh.
- 2) Pembelajaran efektif. Dalam upaya maksimal program implementasi merdeka belajar yang dilaksanakan oleh SMPN 195 Jakarta, melibatkan siswa, khususnya dalam pembelajaran. Melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan potensi guru dalam menciptakan pembelajaran yang apik, kreatif dan menyenangkan diharapkan keterlibatan siswa secara penuh dan menyeluruh dalam pembelajaran dapat tercapai, hal ini tentunya akan membuat pembelajaran lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan.
- 3) Tidak terdapat siswa yang tinggal kelas, atau tertinggal dalam proses pembelajaran. Dalam merdeka belajar, tidak diperkenankan siswa tertinggal dalam pembelajaran, namun jika terdapat siswa yang tertinggal dalam pembelajaran, maka tugas guru adalah memberikan pembinaan dan bimbingan secara khusus untuk membantu siswa tersebut untuk menyelesaikan ketertinggalan tersebut, sesuai dengan potensi siswa. Hal ini dimaksudkan sebagai pemerataan kesempatan siswa untuk dapat mencapai kemampuan secara maksimal dalam pembelajaran.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di ketahui bahwa peran Kepala SMPN 195 Jakarta di dalam implementasi merdeka belajar sangat penting, di buktikan dengan adanya monitoring kepala sekolah secara rutin dan menyeluruh dalam berbagai aspek. Berbagai saran dan masukan

kepada para guru berdasarkan evaluasi dan temuan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program implementasi merdeka belajar dilakukan kepala sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran Kepala SMPN 195 Jakarta dalam implementasi merdeka belajar dapat dirasa cukup maksimal khususnya sebagai pengarah kepada guru dan tenaga kependidikan agar dapat menyesuaikan diri sesuai tuntutan kurikulum.

Sebagai supervisor dalam program implementasi merdeka belajar, Kepala Sekolah melakukan monitoring, penilaian dan pembimbingan melalui kegiatan supervisi perencanaan, supervisi pelaksanaan dan supervisi penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan secara berkala, meskipun waktu yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan. Sebagai manajer dalam Kepala sekolah menyusun Rencana Kerja Sekolah dan dokumen kurikulum sekolah, membagi tugas guru dan tenaga kependidikan, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan pembelajaran serta monitoring keterlaksanaan program yang telah dibuat. Selain hal tersebut, Kepala SMPN 195 Jakarta adalah fasilitator dalam implementasi merdeka belajar melalui penyediaan fasilitas dan kesempatan bagi warga sekolah untuk merdeka dalam belajar dan mengajar.

Kepala SMPN 195 Jakarta memiliki kemampuan dan keahlian untuk memberi pengaruh, memotivasi, menggerakkan dan mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan, dalam hal ini tujuan yang diinginkan adalah pelaksanaan program implementasi merdeka belajar secara maksimal dan menyeluruh. Kepala SMPN 195 Jakarta berperan yang penting secara langsung dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten dalam menghadapi perkembangan kurikulum merdeka belajar yang sesuai dengan kemajuan zaman. Tuntutan kurikulum merdeka adalah perubahan karakter siswa, baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran (Baharuddin, 2021). Perubahan karakter tersebut terdapat dalam profil pelajar pancasila, yang secara umum dapat dikategorikan sebagai kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif yang dibarengi dengan kecerdasan karakter. Peran sentral Kepala sekolah dalam program implementasi merdeka belajar dapat terlihat dan terukur dari kebijakan yang tepat kondisi dan tepat waktu dalam menghadapi berbagai polemik dalam program implementasi merdeka belajar dan pemahaman beban kerja sebagai kepala sekolah yang terdiri atas tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervise (Ismail, 2021).

Kesimpulan

Kepala Sekolah adalah pimpinan tertinggi di Sekolah yang berperan sebagai manajer yang memberikan arah serta pengatur sekolah. Sebagai manajer kepala sekolah harus mampu membangun dinamika yang bermutu dari ruang lingkup sekolah sebagai daerah kekuasaannya. Kemampuan manajerial kepala sekolah mencakup aspek manajemen pendidikan, pengelolaan kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan khusus dan hubungan dengan masyarakat. Kepala sekolah bertanggung jawab membimbing dan membina guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam implementasi merdeka belajar, kepala sekolah berperan sebagai penggerak proses pembelajaran yang terpusat pada siswa dan memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi guru untuk merancang kegiatan belajar mengajar yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan siswa, dan memberikan ruang bagi tenaga kependidikan untuk meningkatkan potensi diri dalam kualitas bekerja sehingga tujuan pendidikan secara mutlak dapat terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Angga, A., & Iskandar, S. (2022). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 5295–5301. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2918>
- Arviansyah, M. R., & Shagena, A. (2022). Tantangan dan Peran Dari Guru dalam Kurikulum Merdeka Belajar. *Lentera Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 15(1), 219–232.
- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(1), 195–205. <https://doi.org/10.30605/jsgp.4.1.2021.591>
- Berkovich, I. (2018). When the going gets tough: Schools in challenging circumstances and the effectiveness of principals' leadership styles. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 28(5), 348–364.
- Daga, A. T. (2021). Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(3), 1075–1090. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i3.1279>
- Hafid, A., & Amran, M. (2022). Analisis Implementasi Program Merdeka Belajar di SDN 24 Macanang dalam Kaitannya dengan Pembelajaran IPA/Tema IPA.
- Ham, S. H., Duyar, I., & Gumus, S. (2015). Agreement of self-other perceptions matters: Analyzing the effectiveness of principal leadership through multi-source assessment. *Australian Journal of Education*, 59(3), 225–246.
- Ibukun, W. O., Oyewole, B. K., & Abe, T. O. (2011). Personality characteristics and principal leadership effectiveness in Ekiti State, Nigeria. *International Journal of Leadership Studies*, 6(2), 247–262.
- Ismail, S. (2021). Analisis Efektivitas Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Melaksanakan Manajemen Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi [JMP-DMT]*, 1(3), 161–167.
- Kemdikbud. (2020). Merdeka Belajar: Pokok-Pokok Kebijakan Merdeka Belajar. *Makalah Rapat Koordinasi Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia*.
- Kempa, R., Ulorlo, M., & Wenno, I. H. (2017). Effectiveness Leadership of Principal. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 6(4), 306–311.
- Mahlianurrahman, M., & Aprilia, R. (2022). Lokakarya Pengembangan Media Pembelajaran Video berbasis Kearifan Lokal pada Kurikulum Merdeka. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 1377. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i4.6119>
- Puspita E. P., D., & Mayanti, S. (2021). Integrasi Media Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka Belajar di Lingkungan Siswa SMK. *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 8, 2614–0217. <https://doi.org/10.32923/edugama.v8i1.2468>
- Ramadina, E., Sayyid, U., & Tulungagung, A. R. (2021). Peran Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. 7(2), 131–142. <https://doi.org/10.47776/mosaic>
- Sanusi, H. (2022). Media Kurikulum Merdeka Belajar Suatu Kajian Sosiologi Pendidikan dalam Menggugah Perspektif Masa Kini. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 4(3), 14–21.
- Sebastian, J., Allensworth, E., Wiedermann, W., Hochbein, C., & Cunningham, M. (2019). Principal leadership and school performance: An examination of instructional leadership and organizational management. *Leadership and policy in schools*, 18(4), 591–613.
- Sehgal, P., Nambudiri, R., & Mishra, S. K. (2017). Teacher effectiveness through self-efficacy, collaboration and principal leadership. *International Journal of Educational Management*.

- Sihaloho, B. (2021). Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mewujudkan Merdeka Belajar DI SMK Negeri 1 Patumbak. *JGK (Jurnal Guru Kita)*, 6(2), 35-41.
- Sulistiyosari, Y., Karwur, H. M., & Sultan, H. (2022). Penerapan Pembelajaran Ips Berdiferensiasi Pada Kurikulum Merdeka Belajar. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 7(2), 66-75.
- Sunaengsih, C., Anggarani, M., Amalia, M., Nurfatmala, S., & Naelin, S. D. (2019, April). Principal Leadership in the Implementation of Effective School Management. In Elementary School Forum (Mimbar Sekolah Dasar) (Vol. 6, No. 1, pp. 79-91)
- Suryana, C., & Iskandar, S. (2022). Kepemimpinan kepala sekolah dalam menerapkan konsep merdeka belajar di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7317-7326.
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3485>
- Wannesia, B., Rahmawati, F., Azzahroh, F., Ramadan, F. M., Agustin, M. E., Ekonomi, P., Keguruan, F., & Pendidikan, I. (2022). *Inovasi Pembelajaran Kurikulum Merdeka di Era Society 5.0*. 16(2), 232–234. <https://doi.org/10.26877/mpp.v16i2.13479>
- Wulandari, S., Sawita, N., & Rustam, R. (2022). Efektivitas Blended Learning Berbasis Proyek Pada Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Tunas Pendidikan*, 5(1), 211-221.
<http://ejournal.stkip-mmb.ac.id/index.php/pgsd/login>